



**LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
ARSITEKTUR  
RELOKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI PROPINSI JAWA TENGAH DAN  
D.I. YOGYAKARTA DI SEMARANG**

Diajukan untuk memenuhi sebagian  
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Teknik

diajukan oleh :

**TAUFIQ HIDAYAT  
NIM. L2B 005 206**

Dibimbing Oleh :

Pembimbing 1 : Ir. Dhanoë Iswanto, MTA

Pembimbing 2 : Ir. Agung Budi Sarjono, MT

Periode 108

Agustus - Desember 2009

Kepada

**JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2009

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia perdagangan terutama ekspor dan impor di dunia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan berjalannya waktu. Kegiatan ekspor impor tersebut harus di kontrol agar tidak membawa pengaruh negatif bagi suatu bangsa, misalnya penyelundupan barang berbahaya, monopoli usaha, dsb. Setiap negara di dunia memiliki suatu lembaga yang disebut dengan kepabeanan.

Di Indonesia, instansi tersebut berada di bawah wewenang Departemen Keuangan dan bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peran Dirjen Bea dan Cukai di Indonesia sangat penting mengingat fungsi dan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang menangani administrasi serta keamanan ekspor impor barang. Dirjen Bea dan Cukai memiliki beberapa kantor perwakilan atau lebih dikenal dengan istilah kantor wilayah di beberapa provinsi, salah satunya di Semarang yang membawahi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terletak di Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jalan Coaster 1-3.

Gedung Kantor Wilayah (KANWIL) dibangun pada tahun 1985 dan mulai digunakan sejak 01 Nopember 1986, di mana gedung tersebut merupakan sebuah bangunan dengan luas  $\pm 6.000$  m<sup>2</sup> terletak di atas tanah seluas  $\pm 11.930$  m<sup>2</sup> yang disewa dari PT. Pelindo Cabang III Semarang. Gedung tersebut terdiri atas 3 (tiga) lantai. Gedung yang ada dipergunakan secara bersama-sama oleh para Pegawai Kantor Wilayah Jateng dan DIY dengan para Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, dengan total jumlah pegawai sebanyak 394 orang terdiri dari 153 orang pegawai Kantor Wilayah dan 241 orang pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Ruangan yang ada saat ini sudah sangat tidak memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan jauh di bawah standar persyaratan yang diperlukan untuk mendukung produktivitas.

Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang berlokasi di komplek pelabuhan dinilai kurang representatif melihat kondisi lingkungan yang kurang aksesible, terutama dari Yogyakarta. Selain itu, masalah mendasar yang

dihadapi oleh pelabuhan tanjung emas adalah masalah rob atau air pasang yang semakin parah, yang berdampak pada terputusnya infrastruktur jalan serta menurunnya ketinggian permukaan tanah. Genangan air rob ini sangat mengganggu proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Sarana dan prasarana di lantai dasar seperti server computer dan sistem pelayanan sering mengalami gangguan dengan datangnya genangan air rob tersebut. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Langkah yang selama ini sudah ditempuh untuk mengatasi genangan rob ini adalah dengan beberapa kali menaikkan/meninggikan halaman kantor dan jalan masuk serta menyediakan beberapa unit mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot genangan air rob dan membuangnya ke parit-parit di luar gedung kantor. Namun mengingat bahwa pompa tersebut digunakan untuk menyedot air laut/asin, maka pompa tersebut sering mengalami kerusakan dan usia pompa menjadi pendek. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya/kurangnya ketersediaan anggaran perawatan untuk menanggulangi kerusakan pompa yang sering terjadi.

Dengan beberapa kali peninggian permukaan jalan yang dilakukan oleh PT. Pelindo pada akhir tahun 2006, saat ini lantai 1 (dasar) telah berada pada posisi 1 m di bawah permukaan jalan, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa yang dilakukan di lantai tersebut.

Dengan adanya relokasi Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Propinsi Jateng dan D.I Yogyakarta diharapkan dapat tercapai kinerja yang optimal dengan berbagai syarat pendukung, antara lain adanya sarana dan prasarana yang memadai dan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan mereka.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.2.1 Tujuan**

Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur tentang relokasi Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Propinsi Jateng dan D.I Yogyakarta.

### **1.2.2 Sasaran**

Tersusunnya program ruang dan konsep dasar perancangan.

### **1.3 MANFAAT**

#### **1.3.1 Secara Subyektif**

Sebagai pemenuhan syarat Tugas Akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang nantinya digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam perancangan Relokasi Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Propinsi Jateng dan D.I Yogyakarta.

#### **1.3.2 Secara Obyektif**

Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya dibidang arsitektur.

### **1.4 RUANG LINGKUP**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Perencanaan dan perancangan Relokasi Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta di Semarang, termasuk dalam kategori building dan perancangan tapak.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Secara administratif adalah daerah perencanaan Relokasi Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta di kota Semarang.

### **1.5 METODE PEMBAHASAN**

Metode pembahasan yang digunakan yaitu survey kepustakaan dan lapangan. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1 Wawancara**

Melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait yang berkompeten dengan permasalahan tersebut guna mendapatkan data primer.

#### **1.5.2 Studi Literature**

Mencari literature dengan mempelajari berbagai pustaka yang berkaitan dengan topik yang diangkat sebagai standar perencanaan dan perancangan yang digunakan dalam penyusunan program.

### **1.5.3 Observasi Obyek**

Melakukan pengamatan terhadap obyek ( Kanwil Dirjen Bea Dan Cukai ) baik secara langsung terhadap obyek serupa di dalam negeri maupun pengamatan obyek secara tidak langaung melalui internet terhadap obyek serupa di luar negeri yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

## **1.6 KERANGKA PEMBAHASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan dan kerangka pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang teori-teori dasar sistem bangunan kantor beserta penggunaan bangunan kantor beserta pelaku yang terdapat didalamnya.

### **BAB III TINJAUAN KOTA SEMARANG DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PROPINSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA DI SEMARANG**

Berisi tinjauan kota Semarang, yang meliputi data fisik, BWK, peraturan pemerintah, dan tinjauan Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Propinsi Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta.

### **BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Berisi uraian yang berkaitan dengan dasar pendekatan dan analisis untuk menentukan program perencanaan dan perancangan yang mengacu pada aspek-aspek fungsional, kinerja, teknis, kontekstual, arsitektural, serta pendekatan lokasi dan tapak.

### **BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Berisikan konsep dasar perencanaan, konsep dasar perancangan serta program dasar perencanaan dan perancangan.

## 1.6 ALUR PIKIR

